

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 tentang pemerintahan daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi (Wurara *et al.*, 2020). Pembangunan di daerah harus didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan tiap-tiap daerah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, tepat sasaran, komprehensif, dan sistematis (Dione, 2020).

Salah satu yang mendukung keberhasilan dan kualitas perencanaan pembangunan adalah tersedianya data dan informasi yang menyangkut sumber daya yang mendukung pembangunan dan sumber-sumber pendapatan negara. Selaras dengan implementasi program pembangunan yang berjalan cepat diperlukan sajian data dan informasi terbaru sebagai bahan eksplorasi yang tidak cukup lagi dengan data manual akan tetapi menjadi lebih mudah dengan data elektronik yang dikelola dengan bertanggung jawab. Perencanaan yang efektif dan efisien diperlukan untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan perencanaan pembangunan. Data dan informasi yang dihasilkan dalam merencanakan pembangunan akan sangat akurat dan konsisten dengan penggunaan serta pemanfaatan Sistem Informasi (Ekaputra, 2021).

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 7 bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur, aplikasi dan keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) Pasal 2 bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (Wurara *et al.*, 2020).

Pemerintah dalam hal mengupayakan penerapan konsep e-government untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah yang ada di tingkat pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dengan membangun sebuah sistem informasi yang secara online dapat berjalan secara efisien dan mandiri serta memudahkan siapa saja, kapan saja dan dimana saja untuk mengakses data informasi yang diinginkan melalui sebuah sistem data dan informasi yang disebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD (Balqis *et al.*, 2021). Latar belakang digunakannya SIPD di karenakan memiliki kerangka regulasi, memiliki alur proses lengkap (prinsip manajemen), menggunakan kodefikasi sebagai basis data, terintegrasi dengan sistem informasi kementerian maupun lembaga, efektif dan efisien

sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran pada instansi Organisasi di Daerah. Dimana dalam hal pengelolaan proses tersebut berupaya dalam hal peningkatan pembangunan di semua sektor dalam unsur pemerintahan di setiap daerah. sehingga sistem informasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta mengambil peran yang optimal dalam proses implementasi dalam pelaksanaannya agar dapat menyentuh semua aspek yang di butuhkan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Ratu *et al.*, 2022).

Sistem Informasi pemerintahan Daerah didasarkan pada kapasitas serta kebutuhan tiap-tiap daerah yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga proses pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam system informasi pemerintahan suatu daerah dapat terstruktur dan berkesinambungan sesuai dengan visi misi Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah secara Nasional. Mengingat pentingnya hal tersebut oleh karena itu dibutuhkan sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, tepat sasaran, komprehensif, dan sistematis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penguasaan konsep terkait mekanisme dan penyusunan tentang perencanaan dan penganggaran dari suatu daerah (Jamal & Ahlis.Djirimu, 2016).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berfungsi untuk penyatuan Referensi nasional (urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, sumber dana, akun neraca, LO, Anggaran dan LRA), proses Data Daerah (proses perencanaan dan keuangan daerah dilakukan secara elektronik), Proses Evaluasi Elektronik (Evaluasi Perencanaan, kinerja dan produk hukum dilakukan melalui sistem Elektronik), Data Base Nasional (Data base pembangunan Keuangan Nasional dan Daerah). Analisa Data Daerah dan Nasional (Analisa Data daerah secara Nasional dapat dilakukan dengan mudah), Koordinasi Daerah dan Pemerintah Pusat (Koordinasi Pemerintah Pusat dan daerah dalam hal Perencanaan dan Keuangan dapat lebih mudah dilakukan dengan mudah secara Elektronik) (Kemendagri, 2023).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bermanfaat dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi wadah untuk menyatukan Referensi Perencanaan dan Keuangan se-Indonesia, Menghubungkan data Perencanaan Pembangunan, Penganggaran Keuangan Daerah Kabupaten / Kota maupun Provinsi, Mempermudah Sinkronisasi Kebijakan di level Provinsi ke Kabupaten Kota, Memberikan Akses pada Kementerian atau Lembaga untuk dapat melihat Arah Kebijakan Pembangunan di Daerah (Kemendagri, 2023). Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah (Kasmira *et al.*, 2020).

Pada dasarnya SIPD merangkum terkait proses penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai alat dalam penyediaan data-data untuk pengolahan data dan informasi, evaluasi capaian periode sebelumnya, penelaahan RT/RW, analisis isu-isu strategis, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi keuangan daerah. Sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah saat persiapan, rancangan awal dan rancangan dapat berpedoman pada SIPD yang selanjutnya akan diteruskan pada musrenbang, rancangan akhir, hingga peraturan daerah. Keterisian SIPD dalam pelaksanaannya dapat diukur melalui tingkat keterisian data (Kemendagri, 2023).

Penelitian relevan yang mengungkap peran dari SIPD sebagai bagian dari perencanaan daerah telah dilaksanakan oleh (Ruhana, 2017) yang menyimpulkan bahwa penerapan SIPD akan sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui berbagai tahapan seperti tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Hal ini juga sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Yohanes, 2013) menyatakan bahwa implementasi sebagai operasionalisasi dari rangkaian kegiatan dalam meraih sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai kepada pegawai pada tingkatan terbawah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama merupakan salah satu organisasi Pemerintahan Daerah pelayanan publik terkait kesehatan dengan unit terbanyak dalam sistem pemerintahan sehingga membutuhkan perencanaan hingga implementasi setiap program dengan sangat efektif dan tepat sasaran mulai dari sistem pencatatan hingga pelaporan dalam sistem informasi pemerintahan di daerah. Dengan adanya aplikasi SIPD dapat mendukung dalam penetapan prioritas permasalahan di Dinas Kesehatan guna meningkatkan kualitas produk kebijakan publik (Pemprov Papua Barat, 2023). Berdasarkan data dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, Kabupaten Teluk Wondama merupakan salah satu Kabupaten yang belum memiliki data kesesuaian antara Renja, Renstra yang mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017.

Proses penyusunan perencanaan program kegiatan pada Dinas Kesehatan dimulai dari data dan usulan masyarakat dibidang kesehatan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung, distrik dan Kabupaten dibahas ditingkat provinsi yang kemudian dipadukan sasaran program kesehatan mengacu pada draft renstra yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran program kesehatan. Usulan perencanaan program harus sesuai dengan skala prioritas, agar diperoleh anggaran yang efektif dan efisien. Selain itu penyusunan perencanaan, penetapan, realisasi anggaran mengalami kendala kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) (Anna M dan Sugiono A, 2022). Unsur yang mendukung dalam proses pelaksanaan SIPD di Dinas Kesehatan kabupaten/kota adalah Bentuk komunikasi yang efektif dan terarah, sumber daya manusia yang terlibat di dalam pelaksanaan program, Disposisi dari atas ke bawah yang jelas, Struktur Birokrasi yang baik dalam pengaturan setiap program terkait kesehatan yang bisa diakses melalui Sistem

informasi digital maupun manual (Balqis *et al.*, 2021). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak memberikan dampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat. Namun, SIPD memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, seperti membantu meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah, mendukung proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah secara lebih sistematis, menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri, sehingga memudahkan pengambilan keputusan, memperkuat pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi, menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah (Kemendagri, 2019). SIPD tidak secara langsung menyembuhkan atau mencegah penyakit, tetapi dengan memperkuat perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pemerintah daerah, SIPD secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat merupakan salah satu unit kerja sistem Birokrasi dalam sistem pemerintahan sektor Kesehatan yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan daerah dengan memuat sistem keuangan Dinas Kesehatan, sistem perencanaan pembangunan dinas kesehatan daerah serta sistem pembinaan dan pengawasan dalam lingkup Dinas Kesehatan, selain itu sebagai sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian dan refrensi dalam komunikasi informasi keuangan dan juga sebagai pengendalian maupun pemantauan serta evaluasi atas pendanaan dan defisit anggaran daerah dimana sistem ini diakses langsung oleh Pemerintah Pusat (Pemprov Papua Barat, 2023).

Meskipun telah menjadi program pemerintah namun dalam proses implementasinya SIPD masih belum maksimal dan efektif penggunaannya terlihat belum jelas nya komunikasi antara atasan dan bawahan terkait program dan pelaporan dalam bentuk SIPD sehingga terkadang tidak berjalan lancar, selain itu kondisi struktur birokrasi yang kaku membuat jalannya kebijakan dalam bentuk administrasi tidak fleksibel. Sistem perekrutan tenaga operator sebagai Sumber daya manusia dalam implementasi proses penggunaan SIPD juga menjadi perhatian di Dinas Kesehatan dimana sebaiknya dilaksanakan pelatihan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Job description pada pengelola program. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bidang kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis elemen input (sumber daya dan struktur birokrasi) Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat.
- b. Menganalisis elemen proses (pengembangan sistem dan disposisi) Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat.
- c. Menganalisis elemen output (implementasi) Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat.
- d. Menganalisis umpan balik Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana para Birokrasi dalam pelaksanaan SIPD bidang kesehatan di Dinas Kesehatan.

1.4.2 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran penelitian selanjutnya terhadap proses Pelaksanaan SIPD bidang kesehatan di Dinas kesehatan.

1.4.3 Bagi Institusi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintahan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dalam menyusun perencanaan kesehatan dalam pembangunan Kesehatan khususnya Pada Pelaksanaan SIPD bidang kesehatan.

1.5 Tinjauan Umum

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

A. Pengertian Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan (Kemendagri, 2023).

Dengan adanya SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel dan Hatta, 2009). Sementara itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008).

B. Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah semakin kuat fungsinya, dan data yang disajikan semakin akurat, setelah melibatkan daya dukung teknologi informasi, yang dikemas dalam e-government. Dalam perencanaan pembangunan daerah kepentingan data dan informasi akurat, cepat dan memenuhi kepentingan berbagai aspek serta stakeholders yang ada, dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, artinya semua sisi kepentingan pembangunan dapat terpenuhi, keterlibatan banyak pihak semakin diutamakan dan dapat mencapai tujuannya "demokrasi inklusif", dalam proses mencari dan menemukan berbagai permasalahan pembangunan, menentukan daya dukung dan daya tampung wilayah, mengkritisi berbagai faktor pembangunan yang ada,

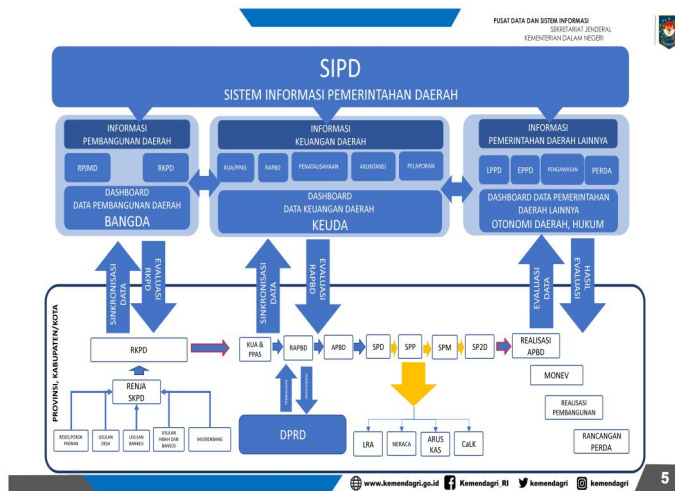
dalam waktu singkat dan akurat, sangat memungkinkan dengan adanya teknologi informasi yang memadai seperti saat ini (Sudianing, 2019).

Sajian data TIK yang lengkap, terbuka, dan dapat dikonfirmasi secara cepat, dalam berbagai fitur dan tampilan kebutuhan, selera dan memenuhi kepentingan banyak pihak, dapat menghadirkan rasa kepercayaan dan semangat saling mendukung, penyerahan dan partisipasi sumberdaya bersama-sama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan secara terbuka, dan bertanggungjawab, penuh dedikasi dan komitmen yang tinggi dari berbagai stakeholders yang ada dapat terwujud melalui penerapan dan tata kelola SIPD yang benar. SIPD melalui *e-government*, ini memungkinkan terjadinya Share Goals (tujuan bersama) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, sehingga visi yang dicanangkan harus pula mencerminkan kepentingan Bersama (Seputra, 2020).

C. Fungsi dan Manfaat Sistem Informasi Pemerintah Daerah

1. Fungsi dalam SIPD untuk Pemerintah Pusat dan Daerah
 - a) Penyatuan referensi nasional
 - b) Proses perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah dilakukan secara sistem elektronik
 - c) Evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum dilakukan melalui sistem elektronik
 - d) Data base pembangunan dan keuangan nasional dan daerah
 - e) Analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih mudah
2. Manfaat Sistem Informasi Pemerintah Daerah
 - a) Meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan melaksanakan pemerintah daerah.
 - b) Mendorong kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan.
 - c) Sistem yang terintegrasi sehingga mempermudah penyediaan informasi kepada pimpinan dan masyarakat.
 - d) Terintegrasi dengan sistem pengadaan barang dan jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
 - e) SIPD juga mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah dari hulu ke hilir.

D. Alur Pelaksanaan SIPD



Gambar 2. Alur Pelaksanaan SIPD

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Proses pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah melibatkan sejumlah langkah dan tahapan untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara efektif dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah. Berikut adalah analisis proses pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah:

- a. Perencanaan
 1. Identifikasi kebutuhan: Menentukan kebutuhan informasi dan teknologi untuk mendukung operasional pemerintah daerah.
 2. Penyusunan strategi: Mengembangkan rencana strategis untuk implementasi sistem informasi yang sesuai dengan tujuan dan visi pemerintah daerah.
- b. Pengembangan Sistem
 1. Desain sistem: Membuat rancangan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan.
 2. Pembangunan: Menerapkan sistem informasi sesuai dengan rancangan yang telah disepakati.
 3. Pengujian: Melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan kinerja dan keandalan sistem.
- c. Implementasi
 1. Pelatihan: Melakukan pelatihan kepada pengguna dan administrator sistem untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap sistem.
 2. Penyebaran: Memasang dan menyebarkan sistem informasi ke seluruh bagian pemerintah daerah.
 3. Migrasi data: Mentransfer data dari sistem lama ke sistem baru jika diperlukan.

- d. Operasionalisasi
 - 1. Pemeliharaan: Menjaga kinerja sistem dengan melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat lunak.
 - 2. Monitoring: Memantau kinerja sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi dan mengatasi masalah secepat mungkin.
 - 3. Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem untuk memastikan bahwa sistem masih memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.
- e. Manajemen Keamanan
 - 1. Perlindungan data: Menerapkan kebijakan keamanan informasi untuk melindungi data dan informasi yang dimiliki pemerintah daerah.
 - 2. Keamanan fisik: Memastikan bahwa fasilitas dan perangkat keras yang digunakan untuk sistem informasi terlindungi dengan baik.
- f. Pengembangan Berkelanjutan:
 - 1. Inovasi: Mengidentifikasi dan menerapkan inovasi dalam teknologi informasi untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah daerah.
 - 2. Pembaruan: Merencanakan pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi.
- g. Koordinasi Antar instansi:
 - 1. Kolaborasi: Berkoordinasi dengan instansi lain di tingkat pemerintahan daerah atau tingkat nasional untuk memastikan interoperabilitas dan pertukaran informasi yang efektif.
 - 2. Standarisasi: Menggunakan standar yang disepakati untuk memudahkan pertukaran data dan informasi antarinstansi.

Penerapan sistem informasi di pemerintah daerah merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Penting untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan agar sistem informasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik dan pengambilan keputusan di tingkat daerah.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Pendekatan Sistem

A. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah cara mengelola suatu pekerjaan dengan menggerakkan orang lain untuk bekerja sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan ((Herujito, 2011). (Terry, G. R. dan Rue, 2010) mengemukakan manajemen lebih menekankan pada proses dan terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan dengan menerapkan ilmu ataupun seni untuk dapat mencapai tujuan awal.

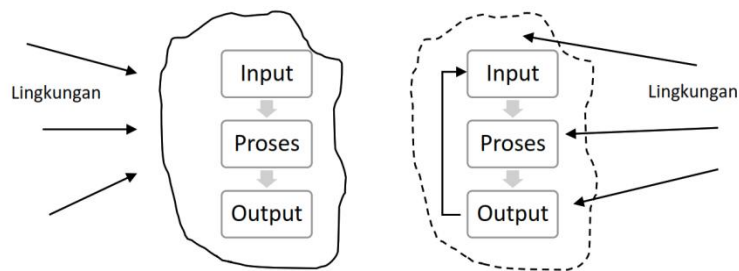
Pendekatan sistem merupakan salah satu pendekatan dalam teori manajemen modern yang merupakan pendekatan dengan memandang organisasi secara keseluruhan sebagai system ((Badrudin, 2013), Sistem

adalah proses transformasi ide menjadi program dan otomatisasi tindakan, dalam konteks tata kelola sistem kesehatan dan pembangunan berkelanjutan (Haghighi & Takian, 2024) Salah satu pendekatan manajemen yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu pendekatan system dimana sistem dikonsept, dikembangkan, dan divalidasi (Choi et al., 2023).

B. Pengertian Pendekatan Sistem

Menurut Ludwig von Bertalanfy, penggagas *General System Theory*, menyatakan "*system is an entity that maintains its existence through the mutual interaction of its parts to achieve*". Secara bebas dapat diartikan sistem adalah suatu entitas yang berusaha menjaga keberadaannya dengan melakukan hubungan yang menguntungkan dengan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan. Bertalanfy mendefinisikan sistem dengan berfokus pada entitas, yaitu suatu obyek atau benda (hidup atau mati), eksistensi, dan tujuan. Sistem pelayanan kesehatan di klinik berusaha mencapai tujuan yaitu mencapai efisiensi yang optimal dengan melakukan koordinasi antar bagian dari pelayanan di klinik seperti poli dokter umum, radiologi, laboratorium klinik, keuangan, administrasi, dan pemasaran (Battle-Fisher, 2015).

Terdapat dua jenis sistem yang ada di dunia ini yaitu sistem manusia (*man system*) dan sistem buatan manusia (*man-made system*). Sistem manusia terdiri dari subsistem-subsistem yang membentuk manusia dan menyebabkan manusia dapat berinteraksi dengan sistem manusia lainnya. Subsistem tersebut antara lain sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem syaraf, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem hormonal, dan sebagainya. Manusia dalam kehidupannya dapat menciptakan sistem yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan. Sistem informasi dibuat manusia untuk mengolah berbagai data sehingga menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem kesehatan diciptakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan pada masyarakat seperti akses pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan sebagainya. Sistem juga terbagi atas sistem yang terbuka (*open system*) dan sistem yang tertutup (*closed system*). Sistem tertutup ditandai dengan tidak adanya interaksi elemen-elemen system dengan lingkungan luar. Hampir seluruh sistem buatan manusia dapat bersifat tertutup, tergantung pada desain yang ditentukan oleh pembuatnya. Sistem akuntansi pada sebuah perusahaan karena mengandung data keuangan yang sangat rahasia, dapat dibuat tertutup dari lingkungan luar. Sementara sistem manusia yaitu manusia itu sendiri merupakan sistem yang terbuka dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ungkapan manusia adalah makhluk social menguatkan pernyataan bahwa manusia adalah sistem yang terbuka. Secara grafis system tertutup dan terbuka disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. Sistem Tertutup (kiri) dan Sistem Terbuka (kanan)

Dari gambar 3 terlihat bahwa sistem tertutup “menolak” informasi atau umpan balik dari lingkungan, sedangkan sistem terbuka selalu menerima informasi dan umpan balik dari lingkungan. Sifat ketertutupan dan keterbukaan sistem mempengaruhi karakteristik system yang akan dibahas secara lengkap pada sub topik berikutnya.

Untuk menjamin agar suatu sistem berjalan dengan baik, maka parameter-parameter kunci pada sistem tersebut harus dikendalikan. Aksioma ini terdiri dari lima prinsip yaitu: 1) *Requisite variety*; 2) *Requisite hierarchy*; 3) *Feedback*; 4) *Circular causality*; dan 5) *Recursion*.

a. Prinsip *requisite variety*

Setiap sistem memiliki elemen-elemen yang disebut dengan Input-Proses Output. Output dari sistem dapat bervariasi tergantung bagaimana interaksi antara Input dan Proses. Pada sistem terbuka (manusia), variasi dari output sistem tidak terbatas. Perilaku manusia tidak dapat ditentukan hanya 1, 2, atau 3 saja tetapi tidak terbatas sehingga lebih sulit bagi praktisi sistem untuk memahami perilaku orang dibandingkan mesin/alat. Keinginan manusia juga tidak bisa dibatasi dengan variasi yang terbatas. Variabilitas yang terhingga ini bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak menyesuaikan dengan kemampuan sistem. Ada dua cara untuk menghindari efek negatif ini yaitu dengan:

1. Menentukan batas-batas sistem. Untuk mengatasi keinginan manusia yang tidak terbatas, maka diterapkan alokasi/budget dana seperti plafon kartu kredit.
2. Membuat kebijakan atau peraturan. Untuk mengatasi dampak negatif akibat perilaku manusia yang tidak terbatas jumlahnya maka dibuat aturan atau kebijakan, misalnya untuk membatasi perilaku tidak aman (*unsafe act*) saat bekerja di ketinggian maka dibuat tata tertib atau standar prosedurnya.

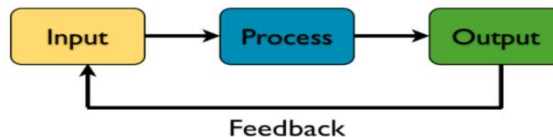
Pada sistem tertutup atau sistem yang dibuat oleh manusia, output sistem dapat ditentukan atau dibatasi sesuai dengan keinginan. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan pada ruang pendaftaran, maka sistem pelayanan pendaftaran bisa dirancang dengan membatasi pasien hingga 100 orang per hari.

b. Prinsip *requisite hierarchy*

Kadang suatu sistem berjalan tanpa ada kebijakan yang mengatur atau membatasi output sistem. Untuk mengatasi hal ini, prinsip *requisite hierarchy* menyatakan bahwa pengaturan output sistem akan dijalankan secara alamiah berdasarkan prinsip hirarki pada sistem. Perilaku subsistem yang berada level rendah akan mengikuti perilaku yang diterapkan oleh sistem di atasnya. Implikasi dari prinsip ini adalah keteladanan pemimpin akan menentukan perilaku orang-orang di bawahnya. Misalnya perilaku unsafe act akan dijalankan oleh pekerja jika manajemen perusahaan memiliki komitmen yang tinggi terhadap K3.

c. Prinsip *feedback*

Untuk mencapai kinerja sistem yang optimal maka dibutuhkan umpan balik (*feedback*) bagi sistem tersebut. *Feedback* (baik pada sistem terbuka dan tertutup) digunakan sebagai kontrol terhadap perilaku sistem sehingga dapat menangkal gangguan yang tidak diharapkan. Prinsip *feedback* digunakan sebagai dasar dalam sibernetika. Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada suatu program kesehatan merupakan contoh prinsip *feedback*.



Gambar 4. Sistem membutuhkan Umpan Balik (*Feedback*)

d. Prinsip *circular causality*

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap sistem akan memberikan dampak kepada sistem lainnya. Sistem A akan berdampak pada sistem B. Sistem B akan berdampak pada sistem C. Sistem C akan berdampak pada sistem A dan seterusnya.

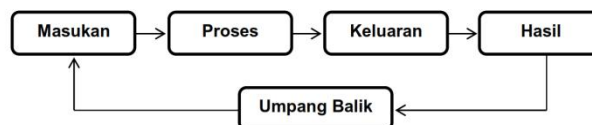
Permasalahan yang terjadi pada Jaminan Kesehatan merupakan contoh *circular causality*. Rendahnya kualitas pelayanan menyebabkan peserta JKN mandiri (yang membayar iuran secara mandiri atau tidak ditanggung pemerintah) merasa dirugikan sehingga tidak ada kemauan untuk membayar.

e. Prinsip *recursion*

Prinsip ini menerangkan bahwa karakteristik sistem atau regulasi sistem pada level teratas dipengaruhi oleh karakteristik dan regulasi sistem level di bawahnya. Prinsip ini merupakan pendekatan bottom-up pada sistem. Karakteristik pelayanan sebuah Rumah Sakit ditentukan oleh karakteristik pelayanan dari unit-unit pelayanan yang ada.

Kerangka berpikir Teori merupakan model konseptual yang menghubungkan antara teori dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Manfaat dari kerangka berpikir yaitu membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah, membantu memilih serta menemukan model yang cocok dalam penelitian. Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori sistem, di mana dalam SIPD ini perlu mengetahui input, proses, output, dan outcome. Sehingga dapat diketahui apakah kebijakan SIPD mampu menciptakan perencanaan pembangunan bidang kesehatan. Adapun kerangka berfikir teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

Menurut Mubarak, 2009 bahwa hubungan unsur sistem saling terkait terdiri atas “masukan (input), proses, keluaran (output), dampak (impact), dan umpan balik (feedback)”. Hubungan unsur sistem ini selain saling terkait juga saling mempengaruhi hasil dari masing-masing unsur satu sama lain.



Gambar 5. Hubungan Unsur Sistem

Sumber: Mubarak & Chayatin (2009:125-126)

Gambar 4 menunjukkan bahwa masukan diperlukan untuk dapat berfungsi sistem. Proses merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Keluaran adalah elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam system (hasil dari proses). Umpan balik merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut. Dampak merupakan akibat yang dihasilkan oleh keluaran suatu sistem setelah beberapa waktu lamanya.

Sebuah sistem terdiri dari beberapa elemen (Muyasaroh, 2016):

1. Terdapat elemen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi hingga membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Fungsi masing-masing bagian atau elemen sistem adalah untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan.
3. Semuanya elemen sistem bekerja sama secara bebas namun disertai dengan pengendalian yang mengarahkannya agar tetap berfungsi sesuai rencana.
4. Sistem tidak tertutup terhadap lingkungan.

C. Elemen Pendekatan Sistem dalam Manajemen

Sistem terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. (Griffin, 2004) menguraikan

manajemen sebagai sistem terdiri atas input, proses transformasi, output, dan umpan balik.



Gambar 6 Bagan Prespektif Sistem Griffin (2004)

Pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistematis. Sistem dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) unsur (Satrianegara, 2009) dalam (Nuraini, 2015), yaitu:

1. Masukan (input): bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut. Masukan manajemen berupa sumber daya manajemen yang terdiri atas *man* (ketenagaan), *money* (dana/biaya), material (bahan, sarana dan prasarana), *machine* (mesin, peralatan/teknologi) untuk mengubah masukan menjadi keluaran, *method* (metode), market dan *marketing* (pasar dan pemasaran), minute/time (waktu), dan *information* (informasi), yang disingkat 7 M + 1 I.
2. Proses (*process*) yakni bagian atau elemen dari sistem yang berfungsi melakukan transformasi mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan.
3. Hasil antara (*output*) yakni bagian atau elemen sistem yang dihasilkan dari proses transformasi/konversi dalam sistem. Hasil akhir (*outcome*) yakni hasil yang dicapai dari suatu program berupa indikator-indikator keberhasilan suatu program.
4. Manfaat dan Dampak (*impact*) yakni efek langsung atau tidak langsung atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan suatu program berupa manfaat dan dampak dari program tersebut.
5. Umpan balik (*feedback*) yakni bagian atau elemen dari sistem yang merupakan hasil antara dan hasil akhir dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut serta informasi yang diterima dari lingkungannya.
6. Lingkungan (*environment*) yaitu bagian di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh besar.

D. Langkah-Langkah Pendekatan Sistem

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam suatu analisa sistem yang baik menurut Djuhaeni (1989) adalah sebagai berikut.

1. Menentukan input dan output dari sistem.
2. Menentukan proses yang dilakukan di tiap-tiap tahap.
3. Merancang perbaikan sistem dan lakukan pengujian.
4. Membuat rencana kerja dan penunjukkan tenaga.
5. Mengimplementasikan dan menilai terhadap perbaikan sistem yang baru.

E. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Sistem

1. Kelebihan Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem menurut Djuhaeni (1989) memiliki kelebihan yaitu:

- a. Jenis dan jumlah masukan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga pemakaian sumber, tata cara dan kesanggupan yang sifatnya terbatas dapat dihindari.
- b. Proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai output yang diinginkan, sehingga kegiatan yang tidak perlu dapat dihindari.
- c. Output yang dihasilkan lebih optimal serta dapat diukur secara lebih cepat dan objektif.
- d. Umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan.

2. Kekurangan Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem yang memiliki kelemahan yaitu dapat terjebak dalam perhitungan yang terlalu rinci, sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan dan akhirnya masalah yang dihadapi tidak akan dapat diselesaikan (Djuhaeni, 1989).

1.6 Sintesa Penelitian

No	Nama/ tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	(Wurara et al., 2020)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Manado (Studi di Bappelitbangda Kota Manado)	Metode penelitian kualitatif	Penerapan SIPD di Kota Manado belum terlaksana dengan baik karena tidak efisien dari sisi waktu karena banyak SKPD yang tidak memasukkan data tepat waktu sesuai waktu yang direncanakan.
2	(Jamal & Ahlis.Djirimu, 2016)	Kajian tentang Fungsi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Poso	Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif	1. Pemanfaatan SIPD membantu dalam merencanakan proses pembangunan di Kabupaten Poso. 2. Perlunya dilaksanakan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penting dan rencana pengembangan di setiap SKPD di lingkup Pemkab Poso. 3. Perlunya ditingkatkan kapasitas SDM pengelola SIPD dalam mendorong motivasi bekerja semua tahapan pelaksanaan dilakukan
3	(Ratu et al., 2022)	Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan SIPD	Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif	investigasi SWOT membedakan elemen internal dan eksternal sehingga didapatkan hasil 4 Strengths, 5 Weaknesses, 3 Opportunities dan 4 Threats.

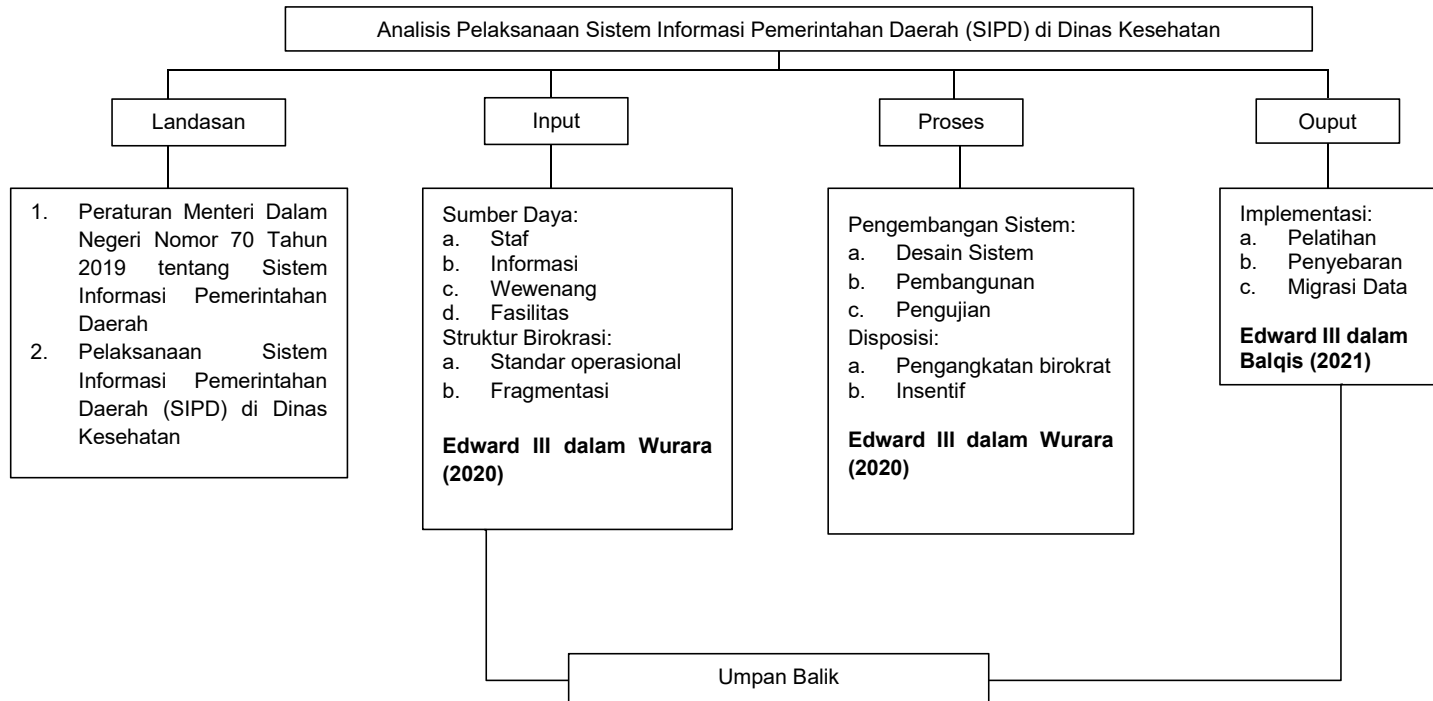
No	Nama/ tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
4	(Anna M dan Sugiono A, 2022)	Evaluasi Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan	Jenis Penelitian ini kualitatif dengan Sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.	Menunjukkan bahwa proses penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Pamekasan secara umum sudah cukup baik namun diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan terutama terkait dengan kualitas SDM Dinas Kesehatan dalam proses penyusunan perencanaan anggaran di Dinas Kesehatan.
5	(Sudianing, 2020)	Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam menunjang peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan : 1. Pentingnya tata kelola SIPD secara berkualitas dalam menunjang perencanaan pembangunan 2. SIPD menjadi bagian <i>e-government</i> dalam perencanaan pembangunan dalam menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif -dalam perencanaan daerah serta mendorong transparansi dan keterbukaan
6	(Kasmira et al., 2020)	Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa	Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi	Penerapan <i>e-government</i> dalam SIPD di Kabupaten Sreagen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Keberlanjutan penerapan SIPD di Kabupaten Sragen dapat terwujud melalui strategi tepat yang dilakukan oleh Pemkab serta <i>goodwill</i> (niat baik) dari Pimpinan daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan SIPD.

No	Nama/ tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
7	Yohannes(2016)	Strategi penerapan teknologi informasi di Pemerintah KabupatenSintang Provinsi Kalimantan Barat.	Metode penelitian kualitatif	1. Faktor Internal terdiri dari SDM, sarana dan prasarana, dana serta budaya organisasi, sementara factor eksternal terdiri dari kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi serta perkembangan teknologi danglobalisasi. 2. Strategi yang perlu dilaksanakan yaitu pengembangan organisasi dan tata kerja, pembuatan aturan perundang- undangan dan kebijakan, pengembangan SDM dalam penerapan teknologi informasi, pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai. pengembangan perangkat lunak yang diperlukan, Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan g) pengembangan dan koordinasi layanan informasi.
8	(Winarno et al., 2019)	Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang	Metode penelitian kualitatif	Pemerintah Kabupaten Tangerang telah bekerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) untuk mengembangkan SIPD Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya SIPD berbasis web tersebut telah diimplimentasikan dan berhasil dioperasionalkan oleh Tim UMN

No	Nama/ tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
9	(Ekaputra, 2021)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk	Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun pertama penerapannya. Yang menjadi hambatan dari efektivitas penggunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD.
10	(Ruhana, 2017)	Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia	Menggunakan studi kasus deskriptif	1. Mekanisme pelaksanaan SIPD dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang SIPD 2. Perencanaan Pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana dalam bentuk Perda.
11	(Balqis et al., 2021)	Implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat	Metode penelitian kualitatif	1. SIPD bagi Disnakertrans Kabupaten Aceh Barat mampu menciptakan informasi data yang lebih baik dan lebih cepat. 2. Penggunaan SIPD menghasilkan data yang diperoleh oleh Disnakertrans Kabupaten Aceh barat lebih baik yang terlihat dari kecepatan penerbitan Peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2021.
12	(Maramis et al., 2021)	Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) BAPELITBANG

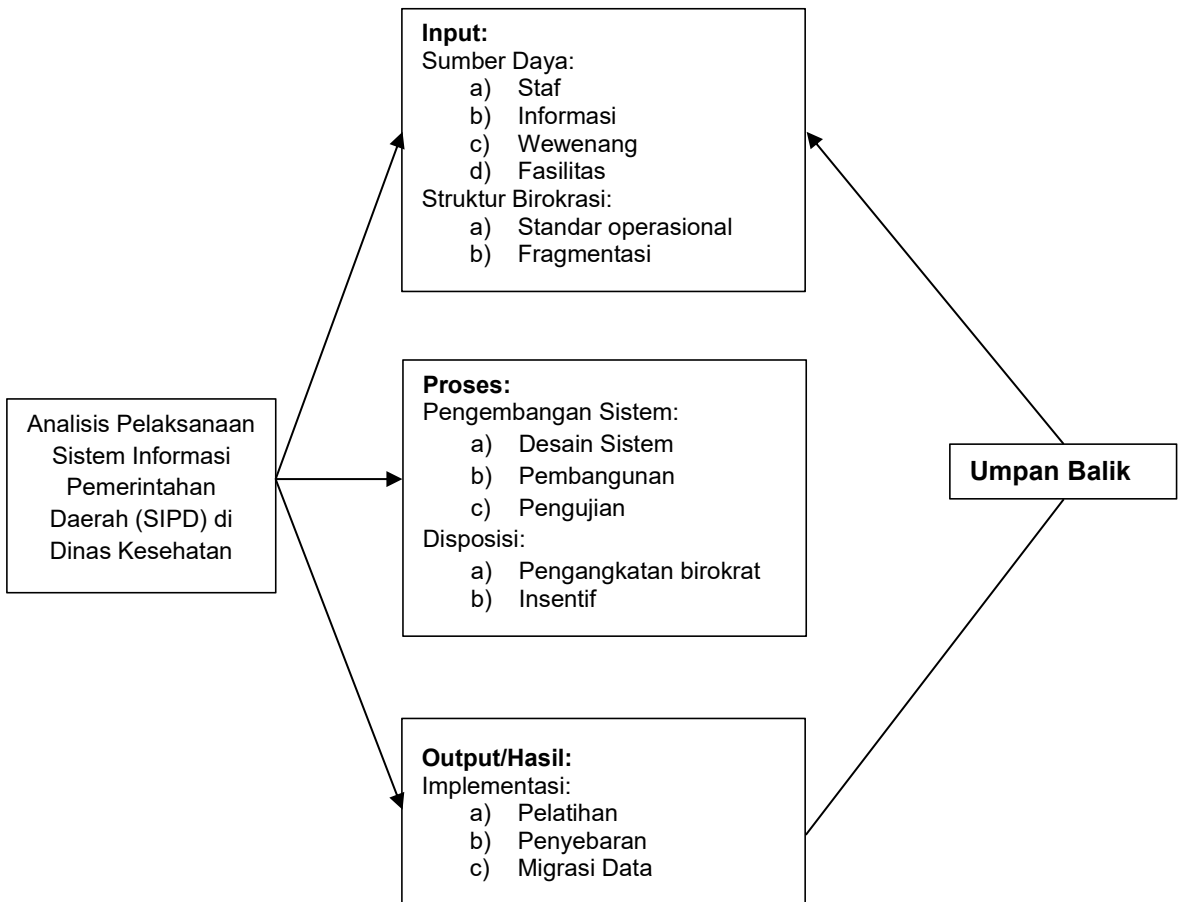
No	Nama/ tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
		(Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara	pendekatan deskriptif.	mengacu pada PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJP, RPJMD serta tata cara perubahan pembangunan

1. 7 Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka teori (Modifikasi dari Teori Azrul Azwar (1996) dan Griffin 2004 dalam Ayuningrum (2019), Edward III dalam Wurara (2020) dan Balqis (2021))

1.8 Kerangka Konsep



1.9 Definisi Konseptual

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
INPUT				
1.	Sumber Daya (Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana)	a. Staff Jika jumlah SDM atau staf pelaksana kebijakan mencukupi atau bahkan terbatas, apakah jumlah SDM yang menjadi Operator Adekuat, apakah SDM mempunyai cukup skill dan kompetensi dalam melaksanakan dan menggunakan aplikasi SIPD serta bagaimana cara pemerintah daerah dalam melakukan perekrutan SDM dalam pelaksanaan SIPD sehingga nantinya hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program dan perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan	Wawancara mendalam	1. Kepala BAPPEDA Teluk Wondama Papua Barat 2. Kabid Anggaran BKAD Teluk Wondama 3. Kepala Dinas Kesehatan 4. Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA 5. Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dan Dinas Kesehatan 6. Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan Teluk Wondama 7. Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan Teluk Wondama

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
		kinerja program. b. Informasi Bagaimana Informasi terkait SIPD dapat di sosialisasikan dengan baik, Bagaimana kesesuaian antara Sistem informasi dalam SIPD bisa sinkron dalam data usulan perencanaan daerah terkhusus pada dinas Kesehatan dimana implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan c. Wewenang Bagaimana Proses Pendelegasian Penginputan usulan		

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
		perencanaan kepada Operator SIPD, bagaimana verifikasi usulan di lakukan oleh BAPPEDA serta bagaimana proses penyediaan Anggaran terhadap usulan perencanaan Dinas Kesehatan. d. Fasilitas untuk melaksanakan kebijakan/program apakah tersedia peralatan dalam mendukung pelaksanaan SIPD (peralatan komputer, wifi, Internet, Software tersedia atau tidak). Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan		
2	Struktur Birokrasi (Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan	a. Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Siapa yang menentukan SOP serta menetapkan SOP dalam melaksanakan SIPD. b. Fragmentasi,	Wawancara mendalam	1.Kepala BAPPEDA 2.Kabid Anggaran BKAD 3.Kepala Dinas Kesehatan 4.Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA 5.Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dan Dinas

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
	apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan)	Bagaimana Bappeda berperan dalam pendelegasian Implementasi SIPD kepada Instansi terkait (dinas Kesehatan, BKAD atau Instansi Lainnya), Bagaimana peran Bappeda dalam menentukan kebijakan besaran anggaran terhadap Perencanaan program kegiatan instansi, serta bagaimana peran Bappeda dalam menentukan nilai Renja yang telah diinput dalam Aplikasi SIPD.		Kesehatan 6.Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan 7. Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan
PROSES				
1.	Pengembangan Sistem: a. Desain sistem: Membuat rancangan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. b. Pembangunan: Menerapkan sistem informasi sesuai dengan rancangan yang telah disepakati. c. Pengujian: Melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan kinerja dan	a. Apakah dalam membuat rancangan sistem informasi sudah memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. b. Apakah penerapan sistem sudah sesuai dengan rancangan kesepakatan. c. Apakah dilakukan pengujian secara menyeluruh dari sistem.	Wawancara mendalam	1.Kepala BAPPEDA 2.Kabid Anggaran BKAD 3.Kepala Dinas Kesehatan 4.Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA 5.Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dan Dinas Kesehatan 6.Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan 7.Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
	keandalan sistem.			
2.	Disposisi (Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut). Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan	a. Apakah Pengangkatan Birokrat, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan Dimana apabila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Selain itu pejabat bagian mana yang sering menghambat dari proses pelaksanaan SIPD (Pejabat Bupati, Pejabat Bappeda atau Pejabat Dinkes). pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, apalagi lebih khusus menyangkut kepentingan warga	Wawancara mendalam	1.Kepala BAPPEDA 2.Kabid Anggaran BKAD 3.Kepala Dinas Kesehatan 4.Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA 5.Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dan Dinas Kesehatan 6.Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan 7.Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
	intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana	masyarakat. b. Insentif, Apakah dalam Implementasi pelaksanaan kegiatan SIPD terdapat pemberian kebijakan berupa Pemberian Insentif , Reward, Bonus atau bahkan penghargaan kepada unit kerja ataupun ke Operator SIPD yang melakukan kegiatan tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tentukan		

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
	yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.			
OUTPUT/HASIL				
1.	Implementasi: a. Pelatihan: Melakukan pelatihan kepada pengguna dan administrator sistem untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap sistem. b. Penyebaran: Memasang dan menyebarkan sistem informasi ke seluruh bagian pemerintah daerah. c. Migrasi Data: Mentransfer data dari sistem lama ke sistem baru jika diperlukan	Bagaimana proses pengimplemntasian SIPD (Pelatihan, Penyebaran, dan Migrasi Data).	Wawancara mendalam	1.Kepala BAPPEDA 2.Kabid Anggaran BKAD 3.Kepala Dinas Kesehatan 4.Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA 5.Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dan Dinas Kesehatan 6.Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan 7.Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan
UMPAN BALIK				
1.	Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan” variabel komunikasi dibagi menjadi 3 (tiga)	a. Transmisi Bagaimana agar komunikasi level Komunikasi antara atasan dan bawahan yaitu komunikasi antara (kepala dinas kesehatan) dan kepala sub bagian perencanaan di	Wawancara mendalam	1. Kepala BAPPEDA Teluk Wondama Papua Barat 2. Kabid Anggaran BKAD Teluk Wondama 3. Kepala Dinas Kesehatan 4. Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
	yaitu : (1) Komunikasi level I (Komunikasi antara atasan dan bawahan yaitu komunikasi antara (kepala dinas kesehatan) dan kepala sub bagian perencanaan ; (2) Komunikasi level II (Komunikasi antara Kantor Dinas kesehatan dengan Bappedda Kabupaten serta (3) Komunikasi level III (Komunikasi antara kantor Dinkes dengan instansi Badan Keuangan dan asset daerah terkait).	lakukan. Bagaimana Komunikasi antara instansi Dinas kesehatan dengan Bappedda Kabupaten serta Komunikasi level III (Komunikasi antara kantor Dinkes dengan instansi Badan Keuangan dan asset daerah terkait) terutama kepada kelompok sasaran pengambil kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung b. Kejelasan bagaimana kejelasan komunikasi level 1 (antara atasan dan bawahan/antara kepala Dinas dan Kepala sub Bagian perencanaan), Bagaimana kejelasan Komunikasi level II (antara dinas Kesehatan dengan Bappedda Kabupaten) dan Komunikasi level III (komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan BKAD) Dimana agar kebijakan yang		5. Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dan Dinas Kesehatan 6. Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan Teluk Wondama 7. Operator SIPD pada Instansi Dinas Kesehatan Teluk Wondama

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
		ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien c. Konsisten diperlukan agar Bagaimana Konsistensi komunikasi level 1 (antara atasan dan bawahan/antara kepala Dinas dan Kepala sub Bagian perencanaan), Bagaimana Konsistensi Komunikasi level II (antara dinas Kesehatan dengan Bappeda Kabupaten) dan Konsistensi Komunikasi level III (komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan BKAD) kebijakan yang		

No.	Definisi Teori	Dimensi	Alat dan Cara Pengukuran	Informan
		diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan		

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana proses penelitian dan pemahaman berlandaskan filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana instrumen kunci adalah peneliti, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi dalam proses perencanaan yang berkaitan dengan SIPD.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Juli s/d Agustus Tahun 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat yakni Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

2.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran kesehatan dan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bidang kesehatan di Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat yang terdiri dari 8 orang yaitu:

- a. Kepala Dinas Kesehatan
- b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
- d. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Bappeda
- e. Kepala Bidang Anggaran BKAD
- f. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan
- g. Sub bidang Pengelola Program kegiatan pada Bidang
- h. Operator SIPD Dinas Kesehatan

2.4 Teknik Pengambilan Informan

Dalam penelitian ini Teknik pengambilan informan yang di gunakan adalah *Puposive sampling* dimana penulis mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan teknik *purposive sampling* (Moleong, 2017).

2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen penelitian dapat berupa (kuesioner, observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya (notoatmodjo, 2012). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan catatan (notes) yang telah disiapkan, kamera, telepon genggam, dan ballpoint. Kamera digunakan untuk melakukan observasi untuk mendokumentasikan kejadian penting yang berkaitan dengan penelitian. Telepon genggam digunakan sebagai perekam suara, sedangkan ballpoint digunakan untuk menuliskan informasi yang didapatkan dari informan penelitian.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan dilapangan adalah wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti saat dilakukan studi pendahuluan dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2019). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti menanyakan beberapa daftar pertanyaan kepada informan. Peneliti melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data primer, dimana data yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil wawancara langsung dari sumbernya.

2.7 Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Abdussamad Zuchri, 2021). Peneliti menggunakan hasil wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan (observasi) mengenai Analisis Proses pelaksanaan SIPD Dinas kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Abdussamad Zuchri, 2021). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai mengenai Analisis Proses pelaksanaan SIPD Dinas kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat

2.8 Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan *Miles and Huberman* dan *Spradley* dalam (Sugiyono, 2019) yaitu:

1. Data *Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data *Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion drawing* (verifikasi)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

2.9 Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi untuk memperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Oleh karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik (Abdussamad Zuchri, 2021).

- a. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber untuk mengkaji data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber data dilakukan berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud.

- b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik (Metode) yaitu untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumen Penelitian.

